

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimmly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Amirudin, *Pengantar, Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Pers, 2010.
- Armin, *Hukum Adminitrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Djojosekarto, Agung, *Akuntabilitas Publik dan Fungsi DPRD*, Jakarta: Penerbit Communication, 2004.
- Fuady, Munir, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Ibrahim, Anis, *Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik dan Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur*. Disertasi Universitas Diponegoro 2008.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- Riskiyono, Joko, *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang*. Depok: Nadi Pustaka, 2017.
- Sinambela, Lijan Poltak, dkk, *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, dan Implementasi)* . Jakarta; Bumi Aksara, 2014.
- Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sugiyono, *Leadership. (gaya, tipologi, fungsi,praktek)*. Yogyakarta: Tugu, 2006.
- Sukanto, Soejono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Sukmana, Oman, *Reformasi dan Agenda Politik Indonesia*. Bestari, No. 25 September-Desember, 1998.
- Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Suryaningrat, Bayu, *Desa dan Kelurahan, Penyelenggaraan Pemerintahannya*, Jakarta: Metropos, 1985.
- Syamsuddin, Haris. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Jakarta: LIPI Press, 2007.

Tarigan, Azhari Akmal, *Syariat Islam di Indonesia; Aktualisasi Ajaran dalam Dimensi Ekonomi, Politik dan Hukum*. Jakarta: Misaka Galiza, 2004.

Utomo, Said Dian. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan*, dalam Indra J.Piliang, Dendi Ramdani, dan Agung Pribadi, *Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi*. Penerbit Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat dan Bangsa, 2003.

Widodo, Djoko, *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Balai Pustaka, 2013.

Yani, Ahmad, *Pembentukan Undang-undang dan Perda*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

### **Perundang-undangan dan Peraturan Lainnya.**

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Perpres No.87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

### **Skripsi**

Antoro, Bayu Marta Dwi. "Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Perspektif Fiqh Siyasah (Studi DPRD Kota Bandar Lampung)." *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Makmur, "Implementasi Asas Keterbukaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Tahun 2018." *Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

### Tesis

Rahmanurrasjid, Amin. "Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang baik di Daerah (Studi di Kabupaten Kebumen)." *Tesis*, Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

### Jurnal

Asyari, Hakim. "Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)." *Jurnal Ilmu Hukum: Refleksi Hukum Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Lombok* 1:3 (2017).

Annisya, Nur. "Partisipasi masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau," *JOM FISIP* 4:2 (2017).

Huzaeni, Mohammad Roky. Widan Rofikir Anwar, "Pelaksanaan Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Dialektika Hukum Universitas Jember* 3:2 (2021).

Jati, Rahendro. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1:3 (2012).

Munir, Sirajul. "Asas Keterbukaan Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Perspektif Islam dan Hukum Positif di Indonesia)", *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus* 12:2 (2021).

Telaumbanua, Dalinama "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota", *Jurnal Education And Development* 4:1 (2018).

Rumesten, Iza. "Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah". *Jurnal Dinamika Hukum* 8: 1(2012).

Santoso, Sugeng. "Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Era Reformasi", *Jurnal Refleksi Hukum* 8:1 (2014).

Sulistiyo, Iwan, Dkk, "Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Kendal," *Jurnal Daulat Hukum* 1:1 (2019).

## Internet

- Ziaggi. “Implementasi: Pengertian, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya.” <https://www.gramedia.com/literasi/implementasi>, diakses tanggal 16 November 2022 pukul 10.13 WIB.
- BPHN. “Undang-Undang Republik Indonesia.” <http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu028>, diakses tanggal 16 November 2022 pukul 11.25 WIB.
- Tafsirweb. “Surat Ali –Imran ayat 159.” <https://tafsirweb.com/1291-surat-ali-imran-ayat-159.html>, diakses tanggal 16 November 2022 pukul 11.30 WIB.
- Antoro, Bayu Marta Dwi. “Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Perspektif Fiqh Siyasa: Studi di DPRD Kota Bandar Lampung.” <http://repository.radenintan.ac.id/6800/1/SKRI%5BSI.pdf>, diakses tanggal 17 November 2022 pukul 11.27 WIB.
- Rafi Aufa Mawardi “Otonomi Daerah: Pengertian, Jenis dan Tujuannya.” <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6116318/otonomi-daerah-pengertian-jenis-dan-tujuannya>, diakses tanggal 16 November 2022 pukul 16.26 WIB.
- Pemkot Malang, “Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” <https://hukum.malangkota.go.id/tata-urutan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/>, diakses tanggal 17 November 2022 pukul 15.02 WIB.
- Bapenda Kalteng, “Pajak Kendaraan Bermotor.” <https://bapenda.kalteng.go.id/pajak-pkb>, diakses pada tanggal 17 November 2022 pukul 15.44 WIB.
- DPRD Kabupaten Badung, “Fungsi, Tugas dan Wewenang.” <https://dprd.badungkab.go.id/menu/88/Fungsi-Tugas-dan-Wewenang.html>, diakses tanggal 17 November 2022 pukul 15.45 WIB.
- Litalia, “Ciri Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Sifat dan Prinsipnya..” <https://www.jurnalponsel.com/ciri-peraturan-perundang-undangan-indonesia-sifat-dan-prinsipnya/>, diakses tanggal 17 November 2022 pukul 16.58 WIB.
- JDIH Yogyakarta, “Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.” <https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/122>, diakses tanggal 17 November 2022 Pukul 16.22 WIB.

- Wikipedia, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.”  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan](https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kabupaten_Kuningan), diakses tanggal 18 November 2022 pukul 15.20 WIB.
- JDIH Kuningan, “Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Kuningan.”<https://jdih.kuningankab.go.id/himpunan-produk-hukum/peraturan-daerah>, diakses tanggal 18 November 2022 pukul 14.00 WIB.
- DPRD Kabupaten Badung, “Fungsi, Tugas Dan Wewenang.”<https://dprd.badungkab.go.id/menu/88/Fungsi-Tugas-dan-Wewenang.html>, diakses tanggal 18 November 2022 pukul 10.30 WIB.
- DPRD Kabupaten Pematang, “Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).”<http://www.dprd-pematangkab.go.id/fungsi-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-dprd/>, diakses tanggal 18 November 2022 pukul 10.55 WIB.
- JDIH Kuningan, “Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Kuningan.”<https://jdih.kuningankab.go.id/himpunan-produk-hukum/peraturan-daerah>, diakses tanggal 18 November 2022 pukul 14.00 WIB.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring.”  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Partisipasi>, diakses pada tanggal 18 Februari 2023 pukul 10.17 WIB.

